

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu-isu Strategis	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	8
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	9
1.8 Sumber Daya Manusia	10
1.9 Keuangan	12
1.10 Sarana dan Prasarana	12
1.11 Permasalahan Utama (Strategic Issue)	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Tujuan dan sasaran	17
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI TAHUN 2023	23
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	25
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	30
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra	32
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)	34

3.5	Akuntabilitas keuangan	34
3.6	Pencapaian kinerja dan anggaran	36
3.7	Efisiensi penggunaan sumber daya	36
3.8	Prestasi dan Penghargaan	37
BAB IV PENUTUP		38
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Permasalahan	39
4.3	Saran	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023</i>	9
<i>Tabel 1.2 Langkah - langkah Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023</i>	10
<i>Tabel 1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023</i>	
<i>Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2023</i>	13
<i>Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023</i>	18
<i>Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023</i>	19
<i>Tabel 2.3 Sasaran Strategist dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai</i>	21
<i>Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023</i>	21
<i>Tabel 2.5 Program kerja : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	22
<i>Tabel 2.6 Program kerja : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	22
<i>Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	24
<i>Tabel 3.2 Atribut Capaian Indikator Kinerja</i>	25
<i>Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023</i>	25
<i>Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023</i>	30
<i>Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra</i>	33
<i>Tabel 3.6 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional</i>	34
<i>Tabel 3.7 Sasaran Strategist dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)</i>	35
<i>Tabel 3.8 Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran</i>	36
<i>Tabel 3.9 Prestasi dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023</i>	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	10
Grafik 1.2 PNS Satpol PP Kota Dumai Berdasarkan Golongan	11
Grafik 1.3 PNS Satpol PP Kota Dumai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai</i>	4
<i>Gambar 1.2 Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai</i>	7
<i>Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai</i>	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mem pertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang kentruman dan ketertiban umum Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



YUDA PRATAMA PUTRA, S. STP

Pembina Tk. I

NIP.1984051 1 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, pada Pasal 3 Disebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan fungsi fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik* dan SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang merupakan Tujuan untuk Meningkatkan Reformasi Birokrasi

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 2 (Dua) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan /Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Operasional Atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional

Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi

untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan Pemberkas Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembentukan Sekretariat PPNS

Sub kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Kegiatan Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	100%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	100%	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **1.071.399.800** (Satu Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk melaksanakan 2 (Dua) Program Kerja antara lain :

**Tabel Pagu Murni
Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 10.373.543.709	APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 680.639.300	APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Pagu Perubahan
Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
tahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.071.399.800	APBD
J U M L A H		Rp. 1.071.399.800	

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja
berdasarkan target dan realisasi tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat	Presentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	1	-	-	-
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%	1	-	-	-
		Presentase Penegakan Peraturan Daerah	100%	32,65%	32,65%	-	-	-	1

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori Berhasil yaitu Berhasil Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp **12.294.971.059** (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. **11.454.943.509** (sebelas milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. **840.027.550**

1. Belanja Operasi	:	Rp.	11.454.943.509
2. Belanja Modal	:	Rp.	840.027.550
Jumlah	:	Rp.	12.294.971.059

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tahun 2023**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	Rp688.622.800,-	Rp685.861.800,-	99,59%
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%			

Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	32,65%	100%	Rp.221.447.000,-	Rp.221.447.000,	100%
---	---	------	--------	------	------------------	-----------------	------

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1.	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyaraka	100%	99,59%	100%	EFISIEN	
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiba, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	99,59%	100%	EFISIEN	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	0%	100%	KURANG EFISIEN	Dikarenakan Belum Adanya Anggaran khusus untuk hal tersebut, dan Belum Maksimalnya Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi antar SKPD Pemangku Perda yang memuat sanksi pidana

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat* tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)* tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%).
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* tingkat efisiensinya adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (32,65%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (32,65%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke 3 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai
5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 21 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan kedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

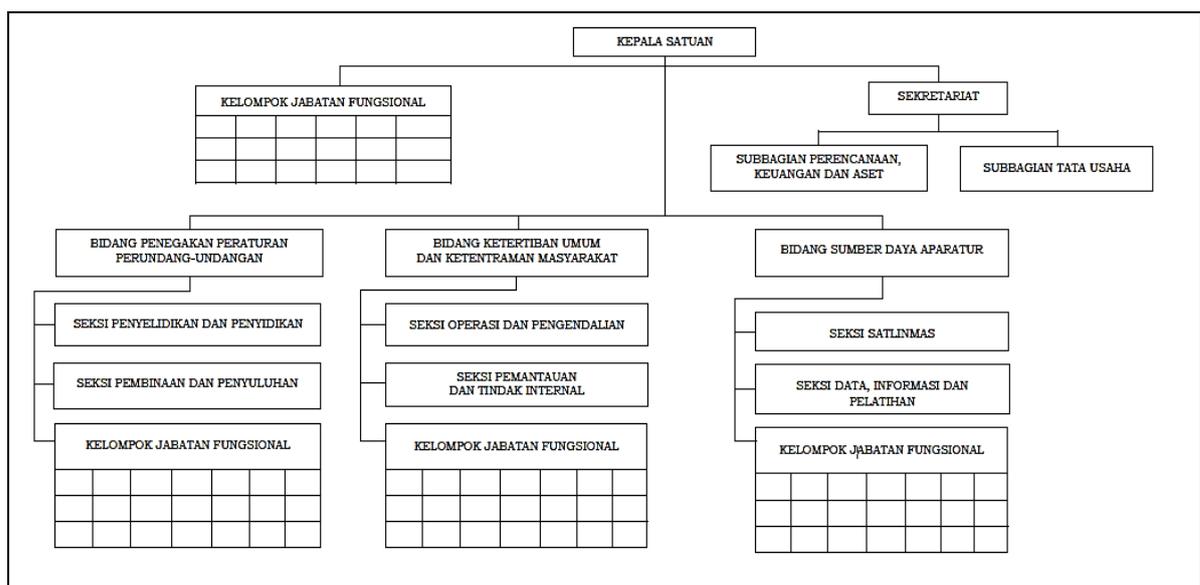
1. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
2. pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparaturnya lainnya;
5. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
6. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);
7. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
8. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
9. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
11. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
12. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;

13. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Satlinmas;
 - b. Kepala Seksi Data Informasi dan Pelatihan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

*Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai*



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi pamong Praja Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang perlu ditangani sbb:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Dumai yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;

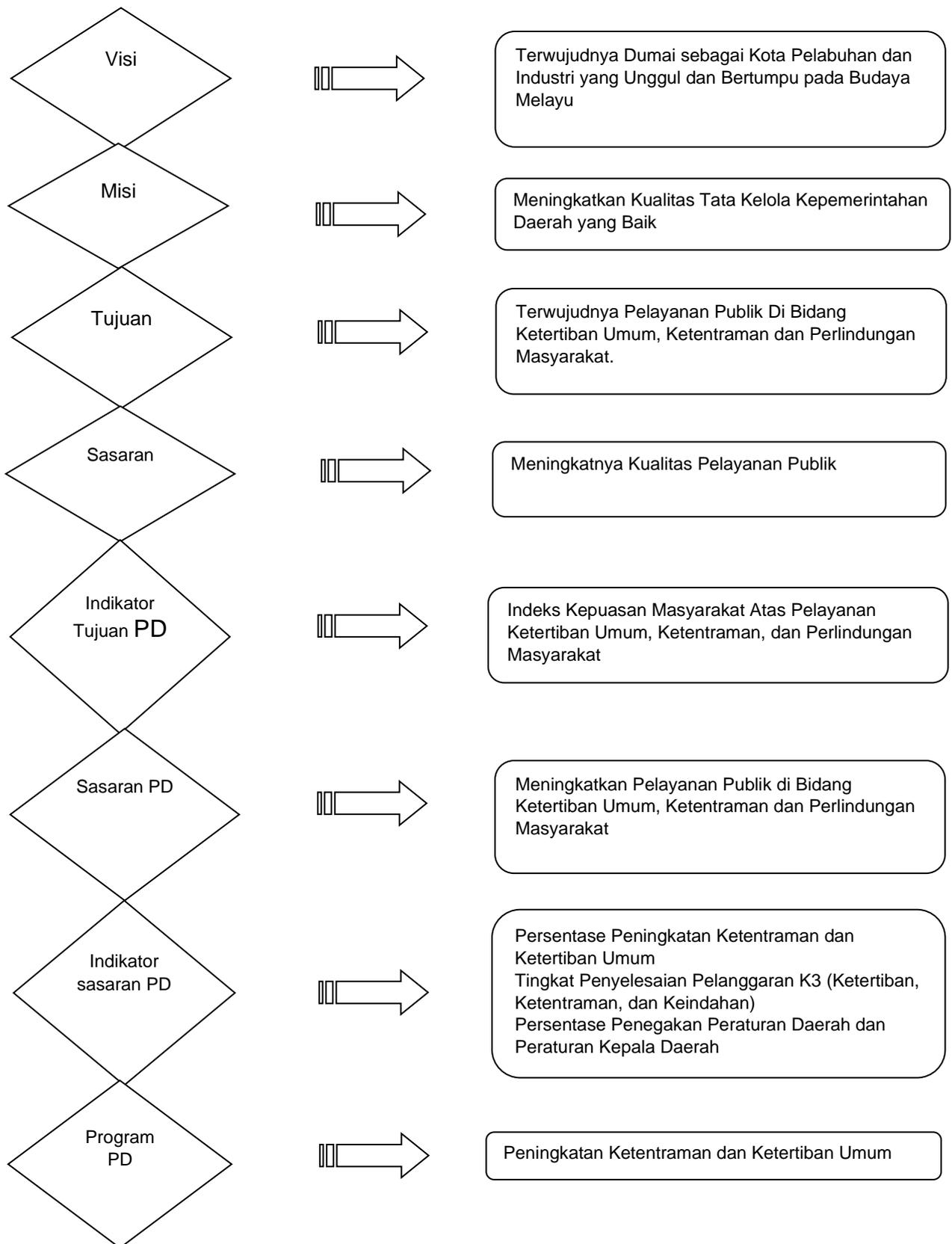
8. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
9. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
10. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
11. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
12. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
13. Kenakalan remaja dan pelajar.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2

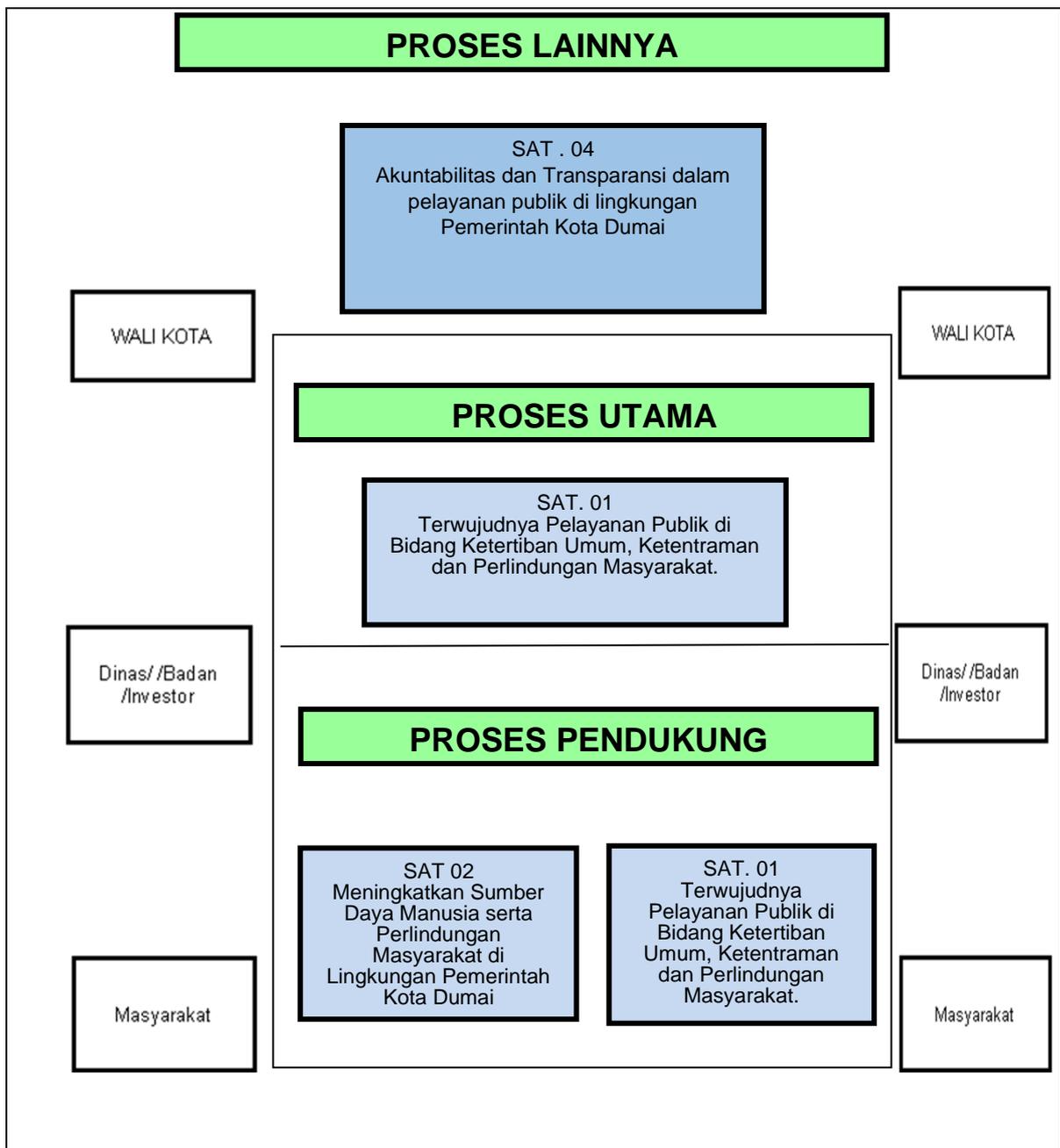
Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1309.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

*Tabel 1.1
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023*

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai pada level eselon 2/Unit Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang pada website atau media sosial resmi Satpol PP Kota Dumai Seluruh pegawai Satpol PP Kota Dumai merumuskan perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK 2023)
2.	Adanya perbaikan khususnya pada akuntabilitas kinerja pada unit kerja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan mencantumkan realisasi rencana aksi dalam monev rencana aksi 2023 hingga TW 3 Tahun 2023
3.	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja. Khususnya SAKIP	Melampirkan Hasil Evaluasi Kinerja pada E Kinerja (satu sampel individu) dan lembar pembayaran TPP Individu (sampel satu bulan) Melampirkan Tabel Evaluasi Renstra PD atau Tabel Pengendalian Perangkat Daerah 2021-2026

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

*Tabel 1.2
Langkah - langkah Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023*

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Seluruh Pegawai Satpol PP akan segera membuat Perumusan Perencanaan Kinerja Berupa PK (Perjanjian Kinerja) dari Pejabat Eselon 2 sampai ke staff kantor, Yaitu PK murni dan PK Perubahan	Januari - Desember
2.	Akan segera melampirkan Hasil Evaluasi Kinerja pada E kinerja pada setiap individu dan Lembar Pembayaran TPP pada setiap bulannya	Januari - Desember
3.	Akan Membuat Tabel Evaluasi Renstra PD dan Tabel Pengendalian (dalev renstra)	Januari - Desember

1.8 SUMBER DAYA MANUSIA

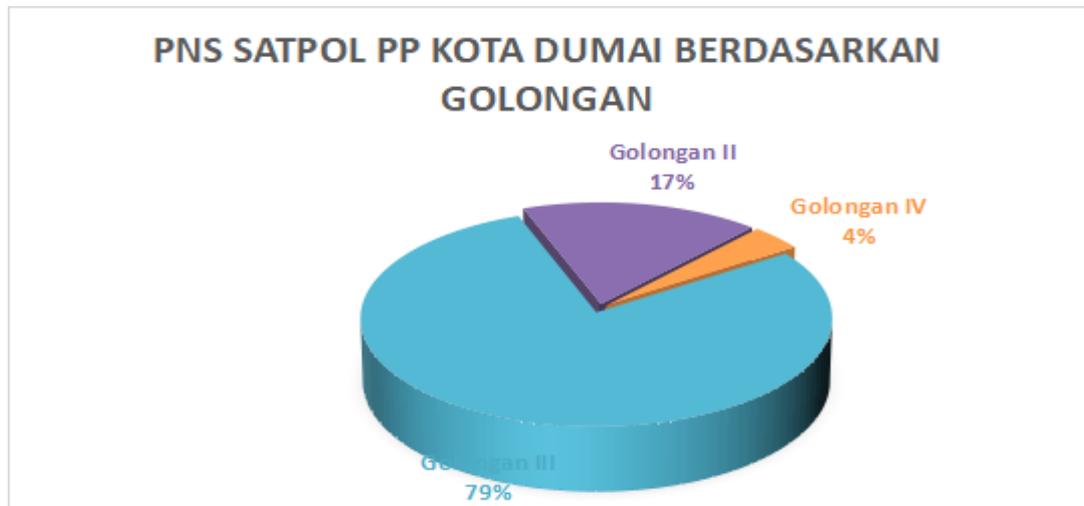
Jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini berjumlah 52 orang pegawai negeri sipil serta 89 orang TKPK Bantuan Polisi Pamong Praja. Komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar Grafik 1.1

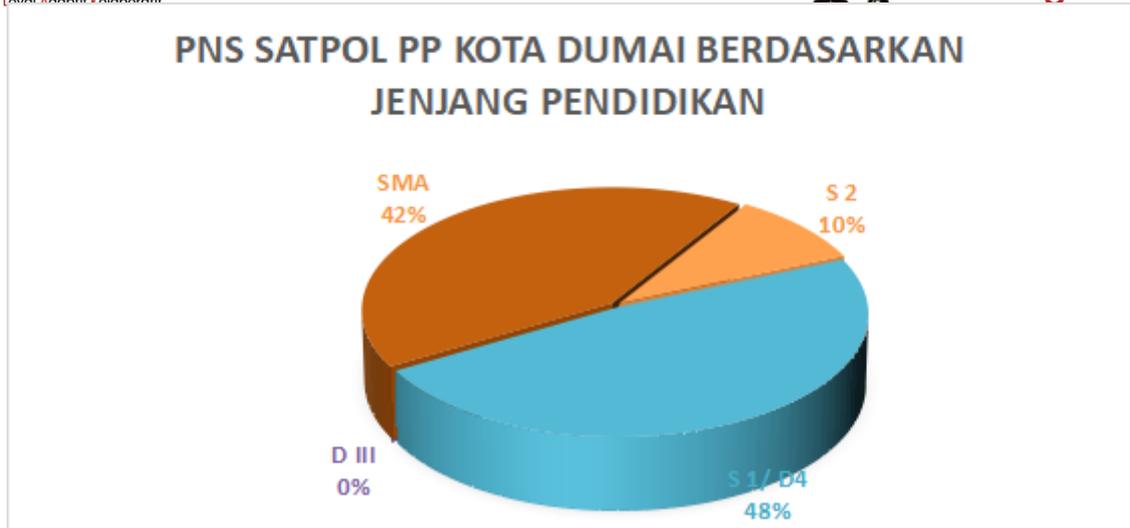
PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, apabila di bedakan berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 Orang, Golongan III sebanyak 41 Orang dan Golongan II sebanyak 9 Orang



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2023

Gambar Grafik 1.2

Sedangkan bila di data menurut Jenjang Pendidikan adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 5 Orang, Sarjana (S1/ D4) terdiri dari 25 Orang, D3 terdiri dari 0 Orang, dan SMA terdiri dari 22 Orang.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2023

Gambar Grafik 1.3

1.9 KEUANGAN

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun Anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 1.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Tahun Anggaran 2023*

5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	11.454.943.509
5.1.01	Belanja Pegawai	6.715.703.800
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	4.739.239.709
5.2	Belanja Modal	840.027.550
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.027.550
	Jumlah Belanja	12.294.971.059

Sumber : DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai TA. 2023

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terletak di Jalan Brigjen H.R. Soebrantas Kota Dumai.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat di lihat di tabel Berikut :

*Tabel 1.4
 Sarana dan Prasarana
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
 Tahun Anggaran 2023*

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH UNIT	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Mobil Patroli	2	1	1	
2	Mobil PAMWAL	1	1		
3	Mobil DALMAS	1	1		
4	Mobil Pendukung Operasional	3	2	1	
5	Sepeda Motor	4	4		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

1. 11 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kota Dumai, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kota Dumai menunjukkan adanya perubahan perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya

masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kota Dumai.

Kota Dumai sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kota Dumai secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Dumai yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
8. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
9. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
10. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
11. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
12. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
13. Kenakalan remaja dan pelajar;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategist

Rencana Strategist dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1

Misi IV Satuan Poisi Pamong Praja Kota Dumai

Tahun 2023



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Duma. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Duma yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Duma dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

*Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023*

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
Misi keIV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	100%	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan KetertibanUmumKetentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah.
			Meningkatkan Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah.
			Adanya Pelaksanaan dalam Penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa
			Peningkatan dalam hal pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat - tempat penting rumah dinas pejabat serta acara - acara resmi
			Adanya pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat.
			Adanya Kegiatan " Prajawati Goes To School " yang merupakan kegiatan cegah dini yang ditujukan bagi anak - anak remaja.
			Peningkatan dalam Penertiban ODGJ dan GEPENG
			Peningkatan dalam Penertiban Pasar
SDM Aparatur Internal	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kota Dumai	Meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

			Adanya perekrutan personil untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik yang lebih optimal.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk pembinaan dan pelatihan personil dalam hal Ketertiban Umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
			Adanya pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Polisi Pamong Praja
Peningkatan kapasitas pengamanan aset daerah	Meningkatkan Kebijakan Penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Melaksanakan Kebijakan Penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Peningkatan dalam penanganan atas pelanggaran penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
			Melakukan Razia dengan diberikannya sanksi kepada pelaku usaha terhadap bangunan tanpa izin atau bangunan liar pada tanah - tanah konsesi dan tempat usaha yang disalahgunakan untuk praktek prostitusi.
			Peningkatan Pengawasan pemantauan terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelayanan publik	Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelayanan publik	Melaksanakan Akuntabilitas yang transparansi di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas yang transparansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategist dan Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No	Sasaran Strategist	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	<p>Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)</p> <p>Persentase Penegakan Peraturan Daerah</p>

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategist Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023

SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI						
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100	100	100	100	100

Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategist Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp12.284.971.059(Dua Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) untuk melaksanakan 2 (Dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Rp. 11.213.571.259,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.071.399.800,-	APBD
JUMLAH		Rp.12.284.971.059,-	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 september 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program kerja : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Rp. 8.939.786.544,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 680.639.300,-	APBD
JUMLAH		Rp. 9.620.425.844,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus: $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah menetapkan Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.3 dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	37 Laporan	Sangat Berhasil	100%	45 Laporan	Sangat Berhasil	100%

		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	1.164 Kasus	Sangat Berhasil	100%	1.710 Kasus	Sangat Berhasil	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21 Perda dari 68 Perda	Tidak Berhasil	100%	16 Perda dari 49 Perda	Tidak Berhasil	32,65%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

a. **Capaian kinerja**

untuk indikator Kinerja Utama Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan Capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100%. Dalam tahun 2023, jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 45 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 45, Capaian kinerja sebesar 100%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Kinerja Utama**

Faktor Pendukung pencapaian Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai sesuai dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya Tim Reaksi Cepat khusus untuk Pelaporan Masyarakat dalam Penanganan ODGJ, dan Orang terlantar.

- Terbentuknya Pamong Bintrantibmas yang di tempatkan disetiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Kota, dimana Petugas tersebut khusus menerima pelaporan masyarakat dalam penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat di kelurahan masing masing.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
- Masih kurangnya jumlah petugas Satpol PP, sehingga untuk memenuhi tindak lanjut pelaporan masyarakat yang ada, merupakan kerja berat bagi Petugas Satpol PP yang bertugas di lapangan.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukannya Patroli Rutin dalam hal menindaklanjuti Laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Perda/Perkada dan juga dalam Penanganan Gangguan Trantibum dan di lingkungan Kota Dumai
- Pengaktifan Petugas Pamong Bintrantibmas dari Satuan Polisi Pamong Praja di akhir tahun 2023 yang untuk sementara ini baru ditempatkan di Kecamatan Dumai Kota dalam mengawasi setiap Pelanggaran Perda/Perkada dan Gangguan Trantibum yang terjadi di masing masing Kelurahan di kecamatan Dumai Kota. Dimana untuk Tahun 2024 ini Petugas Pamong Bintrantibmas ini akan ditambah jumlah anggotanya untuk di tempatkan diseluruh

Kecamatan di Kota Dumai. Namun untuk saat ini masih terbentur di

2. Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Kinerja Utama

Untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3, jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.710 kasus dari 1.710 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Kinerja Utama**

Untuk Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sesuai dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukannya Patroli Rutin dalam hal menindaklanjuti Laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Perda/Perkada dan juga dalam Penanganan Gangguan Trantibum dan di lingkungan Kota Dumai
- Terbentuknya Pamong Bintrantibmas yang di tempatkan disetiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Kota, dimana Petugas tersebut khusus menerima pelaporan masyarakat dalam penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan masyarakat di kelurahan masing masing.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:**

Untuk Indikator Kinerja Utama Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
- Kurangnya Anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

d. Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukannya Patroli Rutin dalam hal menindaklanjuti Laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Perda/Perkada dan juga dalam Penanganan Gangguan Trantibum dan di lingkungan Kota Dumai

3. Indikator Kinerja Utama Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Capaian kinerja

Untuk indikator Kinerja Utama persentase penegakan Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 16 dari 49 Peraturan Daerah, capaian kinerja 32,65%.

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Kinerja Utama

Untuk Indikator Kinerja Utama persentase penegakan Peraturan Daerah tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu Perda yang di tegakkan hanya 16 Perda memuat sanksi dari keseluruhan Perda yang memuat sanksi yang ada.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Untuk Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Belum maksimalnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar SKPD pemangku Peraturan Daerah yang membuat Ketentuan Sanksi Pidana, Sehingga didalam Penegakan Perda terkesan tidak berjalan dengan maksimal dilapangan.
- Kurang adanya pendataan Perda yang tidak berlaku lagi atau Perda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan waktu saat ini, sehingga dalam melaksanakan Penegakan Perda yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana bisa lebih fokus dan terarah.

d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja Utama

adalah sebagai berikut:

- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda yang memuat Ketentuan Sanksi Pidana
- Akan segera dibentuknya Sekretariat PPNS yang berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, yang bertugas dalam hal melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidik penegakan peraturan perundang - undangan di daerah.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat. dst	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	37 Laporan	45 Laporan	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	1.164 Kasus	1.710 Kasus	100%	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	21 Perda dari 68 Perda	16 Perda dari 49 Perda	30,88%	32,65%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai selama 5

- tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindak lanjuti dibagi dengan Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diterima dikali 100%
- b. Pada tahun 2022 Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat target yang dicapai 100% dan mengalami Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 37 Laporan yang diterima berhasil di tindak lanjuti.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja mengalami kenaikan dari Tahun 2022 yang berdasarkan Jumlah Laporan yang diterima dari masyarakat yaitu berjumlah 37 Laporan menjadi 45 Laporan dan capaian kinerja tercapai 100%
2. a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah Kasus Pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran K3 dikali 100%
- b. Pada tahun 2022 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) target yang dicapai 100% dan mengalami Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 1.164 Kasus yang diterima berhasil di selesaikan.
 - c. Pada tahun 2023 target kinerja mengalami kenaikan dari Tahun 2022 kasus yang dilaporkan dari masyarakat yaitu berjumlah 1.164 Kasus menjadi 1.710 Kasus dan capaian kinerja tercapai 100%
3. a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan Jumlah Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi ditegakkan dibagi dengan Jumlah Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi dikali 100% .

- b. Pada tahun 2022 Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mengalami penurunan target yang dicapai 30,88% dari 100% Realisasi pada tahun 2022 adalah 21 Perda dari 68 Perda yang ditegakkan.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja mengalami kenaikan dari Tahun 2022 Perda yang ditegakkan ada 21 perda dari 68 perda sedangkan untuk Tahun 2023 Perda yang ditegakkan ada 16 perda dari 49 yang ditegakkan dan capaian kinerja tercapai hanya 32,65%.

Penyebab target yang dicapai tidak berhasil atau tidak mencapai 100% adalah :

- Belum maksimalnya Koordinasi, Komunikasi, dan Kolaborasi antar SKPD pemangku Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Sanksi Pidana
- Pentingnya dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai.
- Kurangnya Anggaran untuk Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah.
- Belum terbentuknya Sekretariat PPNS Guna salah satunya untuk melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidik penegakan peraturan Perundang-undangan di daerah.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategist	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	32,65%	3,062%

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:
 - Membentuk tim reaksi cepat untuk menangani laporan masyarakat yang masuk.
 - Bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat.
2. Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sebagai berikut:
 - Adanya Kegiatan Patroli Rutin setiap harinya
 - Membentuk Pamongbintrantibmas, yaitu dengan menempatkan 1(satu) orang petugas Satpol PP di setiap kelurahan, yang bertugas untuk mengantisipasi gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dan Pelanggaran K3 di wilayah kelurahan tersebut
3. Capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut:

- Belum Maksimalnya Koordinasi, Komunikasi Dan Kolaborasi Antar SKPD Pemangku Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana, Sehingga Didalam Penegakan Perda Terkesan Tidak Berjalan Dengan Maksimal Dilapangan.
- Perlu Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana.
- Perlu Segera Melakukan Pendataan Perda Yang Tidak Berlaku Lagi Atau Perda Yang Tidak Sesuai Lagi Dengan Perkembangan Waktu Saat Ini, Sehingga Dalam Melaksanakan Penegakan Perda Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana Bisa Lebih Fokus Dan Terarah.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Satpol PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	-	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,88%	-	

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp12.294.971.059,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah)

bersumber dari Belanja Daerah Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp11.454.943.50,- (*Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp840.027.550,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.021.903.148,- (*Dua Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp11.183.875.598,- (*Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp838.027.550,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp12.294.971.059-	Rp12.021.903.148,-	97.77%	

Total anggaran belanja adalah Rp12.284.971.059,- dengan realisasi Rp12.021.903.148,- atau dengan capaian sebesar 99,7% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

- Hal ini Dikarenakan adanya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang bertambah atau berkurang yang dimana ada penerimaan ASN baru dan adanya mutasi/pindah ke instansi lain, resign, dan Potongan gaji yang tidak diambil dari anggaran.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%			99,59%
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%	Rp688.622.800,-	Rp685.861.800,-	
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	32,65%	100%	Rp.221.447.000,-	Rp.221.447.000,-	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan

- persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)* tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* tingkat efisiensinya adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (32,65%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (32,65%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Prestasi dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Tahun 2023

NO	JENIS PENGHARGAAN	PRESTASI	TINGKAT	DIBERIKAN OLEH
1	NIHIL			

BAB IV PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, telah ditetapkan sasaran dan kebijakan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia.
2. Dari jumlah anggaran yang dialokasikan **Rp. 12.294.971.059,-** (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berupa Belanja Operasi sebesar **Rp. 11.454.943.509,-** (sebelas milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah), serta belanja modal sebesar **Rp. 840.027.550,-** (delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) persentase capaian target adalah **97,77%**

atau sebesar **Rp. 12.021.903.148,-** (dua belas milyar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

3. Secara umum capaian indikator kinerja sasaran realisasinya 77,55 % sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian berarti pencapaian Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berada pada penilaian “berhasil”, karena rentang nilainya lebih besar dari 70 %.
4. Selama melaksanakan kegiatan tidak ada ditemui hambatan dan permasalahan yang berarti, walaupun ada namun dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
5. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada ditemui hambatan dan permasalahan yang berarti, namun untuk mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Terdepan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda, masih banyak hambatan dan permasalahan yang perlu diatasi terutama dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban umum serta penegakan Perda. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban umum masih dirasakan kekurangan tenaga atau personil dan tingkat pengetahuan/ keterampilan anggota masih perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mengusulkan untuk tetap melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.

4.2 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan baik dalam kegiatan maupun dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.
2. Kurangnya sarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional dan pendukung lainnya.

3. Masih kurangnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di lingkungan Satpol PP.

4.3 SARAN

Adapun yang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP seperti pelaksanaan diklat–diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, mendata segala kebutuhan mengecek jumlah aset yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, melaksanakan pengadaan alat–alat yang dibutuhkan selama penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001

LAMPIRAN

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti 100% jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti 100% jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.	Meningkatkan pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan X100% Jumlah Pelanggaran K3 X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan X100% Jumlah Pelanggaran K3 X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Kota Dumai	Peningkatan dalam penanganan atas pelanggaran penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan X100% jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan X100% jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi X100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan Akuntabilitas yang transparansi di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas yang transparansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai		

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**


YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19840511 200212 1 001

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA DUMAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	100%	47.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	48.550.000		
2	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	18.000.000
2	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000
2	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kota Dumai, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	1	3.000.000

					Perubahan RKA - SKPD	Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	n		Alokasi Umum		Dokumen	
2	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokume n	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000
2	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokume n	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000
2	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokume n	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	17.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	7.026.319.236				7.544.256.027
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	6.974.644.236	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	7.490.756.027
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokume n	16.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	17.000.000

1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	16.500.000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	48.000.000			100%	52.800.000
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.500.000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	16.500.000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	16.500.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	200.000.000			100%	200.000.000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	200.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	500.682.348			100%	547.500.000

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	60.182.348	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	65.000.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Bulan	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Bulan	75.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	22.000.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.500.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			330.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	630.000.000	-		100%	605.000.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Dumai, Semua	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		1 Paket	120.000.000

					Lapangan	Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Disediakan			Alokasi Umum			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	120.000.000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	120.000.000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	165.000.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.656.350.000			100%	1.804.600.000
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	6.600.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	97.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	98.000.000

1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	70.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	75.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.483.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	1.625.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	500.500.000			100%	525.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	265.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	285.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	55.000.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.000.000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.000.000

1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 %	1.390.798.000			100%	1.431.800.000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Kegiatan	277.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Kegiatan	300.000.000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	25.000.000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	180.000.000

1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kali	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	150.000.000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Kegiatan	36.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	40.000.000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	60.000.000
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	12 Bulan	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	30.000.000
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000

1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Bulan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	150.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	360.000.000			100%	365.000.000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	7 Kecamatan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Kecamatan	50.000.000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300 Usaha	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Usaha	60.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2 Kali	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kali	255.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100%	111.798.000			100%	111.800.000

1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	100 Orang	111.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	111.800.000
TOTAL									11.999.649.584			12.759.206.027

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**




YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19840511 200212 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP**
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023


Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,


YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJATAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100

1 Sasaran 1
Meningkatkan
Pelayanan Publik
Dibidang Ketertiban
Umum, Ketentraman,
dan Perlindungan

1. Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Rp

680.639.300

JUMLAH

Rp

680.639.300

Dumai, Januari 2023


WALI KOTA DUMAI,
H. PAISAL, SKM, MARS


KEPALA,
YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP**
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan ***Pihak Pertama***, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023


PIHAK PERTAMA
YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
NIP. 19840511 200212 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
				2023
(1)	(2)		(4)	(3)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100

I. Sasaran 1 :

Meningkatnya Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp.

1.071.399.800

JUMLAH

Rp.

1.071.399.800

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 25 September 2023

K E P A L A,

YUDA PRATAMA PUTRA, S. STP
NIP. 19840511 200212 1 001



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	
Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak lanjuti}}{\text{jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima}} \times 100\%$	100 %	45 45	=100%
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$	100%		=100%
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan}}{\text{jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%		=100%

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19840511 200212 1 001

**REALISASI PROGRAM, KEGIATAN RUTIN, ANGGARAN, DAN REALISASI
BERDASARKAN DPA OPD SATPOL PP KOTA DUMAI**

PROGRAM	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	TAR GET FISI K	REA LISA SI FISI K	SATUAN TARGET DAN REALISA SI	CAPAI AN KINER JA FISI K (%)	TARGET KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN	CAPAI AN KINER JA	SATUA N
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	100	%	100	11.223.571.259	10.961.291.548	97,66	(%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	Dokumen	100	33.003.000	32.541.998	98,6	(%)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen	100	8.018.700	7.743.500	96,5	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100	2.374.100	2.370.500	99,8	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100	2.967.000	2.967.900	100	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100	1.939.100	1.939.100	100	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100	2.724.200	2.724.200	100	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	2	2	Laporan	100	14.979.000	14.796.798	100	(%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16	16	Bulan/ Laporan	100	6.573.711.309	6.319.585.278	96,1	(%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan	100	6.563.413.800	6.309.287.769	96,1	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	100	2.734.900	2.734.900	100	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan Semester SKPD	2	2	Laporan	100	2.977.809	2.977.809	100	(%)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	Dokumen	100	4.584.800	4.584.800	100	(%)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5	5	Laporan	100	11.663.100	11.663.100	100	(%)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	Laporan	100	4.506.200	4.506.200	100	(%)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1	1	Laporan	100	4.584.800	4.584.800	100	(%)

	Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Laporan	100	2.572.100	2.572.100	100	(%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	Paket	100	365.439.200	365.310.200	99,9	(%)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	Paket	100	365.439.200	365.310.200	99,9	(%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	Bulan	100	496.328.950	495.697.748	98,8	(%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	Paket	100	9.289.950	9.289.950	100	(%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	Paket	100	60.153.100	59.926.220	99,6	(%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	Paket	100	74.704.400	74.579.400	99,8	(%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	Paket	100	15.733.500	15.485.700	98,4	(%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12	12	Dokumen	100	24.480.000	24.480.000	100	(%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan	100	311.968.000	311.936.478	99,8	(%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	Unit	100	967.141.300	965.093.300	99,7	(%)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	Unit	100	125.208.000	125.160.000	99,9	(%)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1	Unit	100	600.000.000	598.000.000	99,6	(%)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	Paket	100	241.933.300	241.933.300	100	(%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	48	Laporan	100	2.240.014.400	2.237.091.650	99,	(%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan	100	5.500.000	5.500.000	100	(%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Laporan	100	132.400.000	132.318.450	99,9	(%)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Laporan	100	155.890.000	153.850.000	98,6	(%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Laporan	100	1.946.224.000	1.945.423.200	99,9	(%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63	63	Unit	100	536.270.000	534.308.274	99,6	(%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	12	12	Unit	100	316.980.000	316.893.000	99,9	(%)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	50	Unit	100	19.290.000	19.290.000	100	(%)
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	Unit	100	200.000.000	198.125.274	99,0	(%)
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100	100	%	100	1.071.399.800	1.060.611.600	98,99	(%)
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	9	Dokumen	100	688.622.800	685.861.800	99,5	(%)
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5	5	Kasus	100	470.626.700	470.526.700	100	(%)
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Untuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5	5	Kasus	100	15.000.000	15.000.000	100	(%)
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	2	2	Dokumen	100	72.300.000	72.215.000	99,8	(%)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	Dokumen	100	99.544.000	97.531.000	99,8	(%)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	11	11	Orang	100	16.130.000	15.567.000	96,5	(%)
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	Dokumen		15.022.100	15.022.100	100	(%)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	3	3	Laporan	100	221.447.000	221.447.000	100	(%)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali kota	1	1	Laporan	100	36.647.000	36.647.000	100	(%)

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	1	Laporan	100	79.950.000	79.950.000	100	(%)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1	1	Laporan	100	104.850.000	104.850.000	100	(%)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	1	Laporan	100	161,330,000	153,302,800	95,02	(%)
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2	2	Laporan	100	161,330,000	153,302,800	95,02	(%)

Dumai, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001